

MENGAPA KITA MISKIN TERUS??

Isidorus Lilijawa

(Viral NTT Edisi 1 – 4 Februari 2023)*

Media online Siarindo.com merilis enam Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di NTT. Kabupaten Manggarai menempati urutan ke enam jumlah penduduk miskin terbanyak di NTT, yakni 69,68 ribu jiwa atau 19,84 persen dari total penduduk Manggarai. Kabupaten Manggarai Timur menempati posisi kelima jumlah penduduk miskin, yakni 74,55 ribu jiwa atau 25,35 persen dari jumlah penduduknya. Jumlah ini hampir menyamai kabupaten Sumba Timur yang berada di posisi ke empat, dengan selisih kurang dari seribu jiwa. Tidak tepaut jauh dengan Kabupaten Manggarai Timur. Jumlah penduduk miskin di



Kabupaten Sumba Timur mencapai 75,28 jiwa atau 28,22 persen dari jumlah penduduk.

Di tempat ketiga ada Kabupaten Kupang yang menyumbang penduduk miskin sebanyak 88,02 ribu jiwa dari 400 ribu lebih penduduk di Kabupaten itu. Meski tidak lagi menyentuh angka seratus ribu, jumlah penduduk miskin di kabupaten Sumba Barat Daya masih membuat Kabupaten ini berada pada kabupaten kedua termiskin di NTT. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya mencapai 98,50 atau 27,16 persen dari total penduduk. Posisi pertama Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di NTT Masih ditempati oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari Seluruh Kabupaten/kota di NTT, pada tahun 2022 TTS menjadi satu-satunya kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin dengan jumlah di atas seratus ribu. BPS NTT merilis ada 120,45 jiwa penduduk miskin di Kabupaten itu, atau 25,45 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022.

Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhadap persentase pada Maret 2022. Secara jumlah, penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022.

Sementara itu, berdasarkan catatan BPS, terdapat lima provinsi termiskin di Indonesia per September 2022 berdasarkan persentasenya. Provinsi termiskin RI ditempati oleh Papua, yakni 26,8 persen. Angka ini meningkat dibandingkan pada Maret 2022, yakni 26,56 persen. Posisi

kedua ditempati oleh Provinsi Papua barat dengan persentase penduduk miskin mencapai 21,43 persen. Angka ini naik dari Maret 2022 yang mencapai 21,33 persen. **Provinsi termiskin ketiga ditempati oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan persentase penduduk miskin mencapai 20,23 persen per September 2022. Angka ini juga meningkat dibanding Maret 2022, yakni 20,05 persen.**

* * *

Selama beberapa tahun terakhir Provinsi NTT selalu menempati juara ketiga provinsi termiskin se-Republik Indonesia. Beberapa tahun lalu, kita menjadi provinsi yang memiliki banyak tekad dan atribut: provinsi ternak, provinsi cendana, provinsi koperasi, provinsi jagung, provinsi kepulauan. Saking sibuknya mengurus banyak tekad ini, NTT jatuh lagi dalam ‘malum’ (keburukan) yang sama yakni kemiskinan. Saat ini ke mana-mana bergema NTT bangkit NTT sejahtera. Namun, kapan sejahteranya kita? Lagi-lagi juara 3 kemiskinan masih kita sandang. Salahnya di mana, kok kita miskin terus?



Saya menduga, pemberitaan tentang ‘juara miskinnya NTT’ ini menimbulkan beragam tanggapan di publik. Pertama, mungkin ada yang berpikir kemiskinan NTT adalah kemiskinan yang seolah-olah. Artinya, secara real tidak miskin, namun hanya miskin dalam angka. Buktinya, hampir selama satu dekade terakhir, kita tetap 3 besar provinsi termiskin. Namun, pemerintah NTT nyaman-nyaman saja. Warga pun tenang-tenang saja. NTT pun belum kolaps. Korupsi jalan terus, mafia di mana-mana. Artinya, kemiskinan itu

hanya soal proyeksi angka-angka statistik yang tidak membuat malu pemerintah yang mengurus rakyat dan rakyat yang mengelola hidupnya sendiri.

Kedua, ada yang merasa biasa-biasa saja dengan peringkat miskin ini. Golongan ini berpikir dari dulu hingga kini, NTT tetap miskin. Toh, bukan NTT kalau tidak masuk peringkat miskin nasional. Sebanyak apapun tekad pemerintah, itu urusan program saja. Faktanya, NTT tetap miskin. Mungkin saja, keyakinan mereka akan berubah jika Yang Kuasa bertindak nyata, karena NTT adalah Nanti Tuhan Tolong.

Ketiga, ada golongan yang tidak kaget dengan posisi NTT dalam kejuaraan kemiskinan nasional ini. Mengapa? Kemiskinan di NTT itu seperti komoditi kopra dan cengkeh, yang pada musimnya akan diperjualbelikan, dengan variasi harga, murah hingga mahal. Menjual kemiskinan sudah

menjadi kegemaran segelintir orang atau lembaga. Kemiskinan sebagai realitas sosial kerap dikomersialisasi untuk mendatangkan dana yang acapkali salah sasaran. Artinya, kemiskinan rakyat dipotret, dijadikan proposal dan dikirim ke lembaga-lembaga donor. Namun, dana untuk rehabilitasi atas kemiskinan itu dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atau lembaga dan rakyat hanya diberi sedikit uang penghibur. Belum lagi pada siklus lima tahunan, kemiskinan laris manis sebagai komoditi dalam jargon jualan politik. Terjadilah politisasi kemiskinan dan sedikit miskinisasi politisi.

Keempat, ada yang tidak peduli atau apatis terhadap fakta kemiskinan di NTT. Golongan ini sibuk mengenyangkan perut sendiri dan kaumnya. Mereka tidak peduli dengan sesamanya yang dengan kesulitan berjuang untuk hidup. Bagi kelompok ini NTT mau miskin terus setiap tahun tidak jadi soal asal gudang makanan mereka berlimpah susu dan madu dan tabungan di bank terus membengkak. Mereka menghidupi filosofi *lu – beta - besong*, bukan filosofi *katong*. Di NTT, realitas sosial yang seperti ini bertumbuh bagai piramida.

Kelima, ada pula orang atau kelompok orang yang malah meragukan data-data BPS. Mereka justru mempertanyakan atas dasar apa BPS merilis NTT sebagai jawara kemiskinan peringkat tiga nasional. Mereka mungkin menggunakan pendekatan ‘*dubium methodicum*’ (metode keragu-raguan) terhadap suatu realitas maupun hasil kajian. Mereka dapat ajukan bukti perbandingan. Bagaimana mungkin NTT disebut miskin, sementara kasus korupsi semakin banyak di daerah ini. bagaimana NTT disebut miskin sementara belum ada pengemisnya. Bagaimana NTT disebut miskin tat kala perjalanan dinas pejabat menghabiskan duit miliaran rupiah.

Keenam, ada orang dan golongan yang malu pada realitas miskin ini dan marah pada kenyataan ini. Mereka menggugat, mengapa NTT miskin terus? Apa yang salah dengan NTT yang potensi alam dan pariwisatanya luar biasa ini? Apa kerja pemerintah selama ini? Membangun kok tambah miskin? Angka kemiskinan berkurang kok orang miskin bertambah? Golongan ini menggugat ke sana ke mari, tetapi mereka tidak banyak berbuat mengobati realitas ini.

Ketujuh, ini kategori kelompok paling alim. Terhadap realitas NTT miskin, mereka mungkin hanya pasrah dan berdoa saja. Berdoa supaya Tuhan menginsafkan para pemimpin NTT agar fokus bekerja untuk rakyat, bukan mengatasnamakan rakyat tetapi bekerja untuk bisnis pribadi, keluarga dan kelompoknya. Mereka berdoa untuk sesamanya yang masih miskin agar mencari jalan sendiri membangunkan diri dan keluarga dari kubangan kemiskinan dengan bekerja, kreatif dan inovatif. Mereka juga berdoa bagi para pelaku terjadinya kemiskinan di NTT, teristimewa dalam perilaku-perilaku malum seperti korupsi, kolusi, nepotisme, suap-menyuap agar segera kembali ke jalan yang benar sebelum dipanggil segera menuju liang lahat.

Kemiskinan NTT yang semakin akut membuat seseorang wakil presiden turun gunung. Tanggal 17 Oktober 2021 lalu, Wapres Ma'aruf Amin melakukan rapat koordinasi terbatas di Kupang terkait 5 kabupten di NTT dengan kemiskinan ekstrem. Mengingat semalam di NTT, Wapres minta di tahun 2024 angka kemiskinan turun menjadi 0 persen dari posisi sekarang 20 persen. Lima kabupaten itu adalah Sumba Timur, TTS, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Manggarai Timur. Lima kabupaten ini jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 212.672 jiwa dengan total rumah tangga miskin ekstrem 89.410 RT.

Dalam rapat koordinasi itu, dimunculkan beberapa strategi mengeliminir kemiskinan ekstrem di NTT. Pertama, memastikan warga miskin terangkul semua program pemerintah, baik program pengurangan beban pengeluaran maupun program pemberdayaan. Kedua, menggenjot penanganan kemiskinan ekstrem melalui intervensi APBD di setiap kabupaten. Ketiga, memberi tambahan uang tunai untuk rumah tangga miskin melalui program sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) desa.

Benarkah Kita Miskin?

Tentang kemiskinan di NTT ini, kadang-kadang saya bertanya, benarkah kita miskin? Apakah kita memang miskin? Jangan sampai kita miskin hanya dalam proyeksi data-data statistik. Jangan-jangan kita miskin hanya dalam narasi atau dalam orasi.

Mengapa demikian? Kita di NTT ini sepertinya tidak miskin. Kita malah sombong dalam kemiskinan itu. Katanya miskin tapi urusan adat, urusan pesta jalan terus. Dalam urusan macam begini, uang pasti ada, hewan pasti ada, barang pasti ada. Kita seperti tidak miskin. Orang boleh bilang kita miskin ekstrem. Mereka tidak tahu betapa besar kadar sombongnya kita di hadapan kemiskinan itu.

Orang bilang kita miskin. Tetapi lihat gaya hidup kita. Lihat gaya hidup para pejabat kita. Mereka seolah-olah tidak merasa bersalah atas kemiskinan itu. Bahkan mereka memanfaatkan kemiskinan untuk memperkaya diri dan kelompok dengan membajak program-program yang seharusnya memberi manfaat untuk rakyat. Mereka ambil untung banyak dari program-program itu. Rakyat hanya dapat sisa.



Kemiskinan kita di NTT itu paradoks. Data BPS, penduduk miskin NTT bertambah sebanyak 19.770 orang. Sementara pada Maret 2020 angka kemiskinan NTT menurun menjadi 20,90 persen. Pemerintah pukul dada nyatakan

angka kemiskinan menurun. Tetapi di sisi lain jumlah orang miskin bertambah. Lalu yang menurun itu angka atau orang miskinnya? Kadang memang aneh. Kemiskinan seperti hantu. Terus diterapi dengan program, tetapi orang miskin bertambah. Yang salah programnya atau eksekutor program. Mestinya berani lakukan evaluasi program-program prioritas. Jika masih relevan dilanjutkan. Tetapi jika tidak, dicari kendalanya di mana. Dirombak total. Jangan menciptakan program hanya untuk mendatangkan keuntungan bagi diri dan kelompok. Lalu rakyat hanya jadi penonton.

Tidak akan habis kita mengulas kemiskinan di NTT yang seperti hantu itu. Semoga terapi atasi kemiskinan ekstrem bisa berjalan baik. Jangan sampai semakin banyak memunculkan orang miskin baru karena mau dapatkan uang tunai melalui BLT dan bantuan sembako. Ah, kapan NTT bisa bangkit dari kemiskinan kronis ini?

** Viral NTT edisi perdana ini menghadirkan pengamat masalah sosial, hukum dan perempuan, Ibu Veronika Ata.*